

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

1. Kelembagaan

a) Koordinasi Pelaksanaan

Rencana induk penelitian ini diharapkan dapat mengatur distribusi sumber daya secara rasional di semua ranah kelitbangan untuk meminimalisir potensi tumpang tindih yang berlebihan serta menempatkan setiap aktor sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Seluruh upaya dan strategi ini bermuara pada peningkatan kontribusi kelitbangan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Pati.

Dalam menjalankan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan diperlukan kerjasama terintegrasi antara perangkat daerah dengan BAPPEDA. Kerjasama ini secara internal merupakan bagian penguatan kelembagaan yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dan aplikasi hasil penelitian di perangkat daerah terkait. Koordinasi antar instansi dapat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan dan sekaligus penggunaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPPEDA.

Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian di daerah, setiap perangkat daerah harus dapat menjalankan mekanisme dan proses kelitbangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Pati, dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas kelitbangan pada masing-masing perangkat daerah. Pengajuan pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah kepada BAPPEDA ditentukan melalui kajian dampak terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Prioritas-prioritas kelitbangan perangkat daerah mengacu pada pencapaian visi misi Kabupaten Pati melalui pelaksanaan program-program unggulan dan prioritas yang berbasis kelitbangan dan berdampak sistematis, konstruktif, berskala luas sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelarasan kelitbangan dari isu-isu pembangunan menuntut penyelarasan dan kerja sama yang bersifat multi-aktor. Artinya, diperlukan sinergi dari aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Untuk dapat memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi realisasi strategi pembangunan daerah. Kesadaran koordinasi lintas sektor dan juga lintas lembaga menjadi satu keharusan.

Koordinasi ini seyogyanya menimbulkan sinergi positif dalam mewujudkan ide atau konsep yang ditetapkan dalam ranah kebijakan kemudian diterjemahkan oleh satu tatanan kelembagaan untuk selanjutnya terumuskan dalam rencana dan program, sebagaimana yang diwujudkan dalam rencana strategis Kabupaten Pati secara umum atau lembaga-lembaga/ perangkat daerah terkait. Program-program tersebut diwujudkan sebagai pengejawantahan kegiatan pembangunan berbasis iptek dan inovasi.

b) Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Keterlibatan institusi kelitbangan bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelitbangan daerah Kabupaten Pati, peningkatan kuantitas dan kualitas kelitbangan serta kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pati tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan dari unsur-unsur di dalam maupun di luar, yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan hasil-hasil kelitbangan dan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang lebih terarah dan menghasilkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan institusi kelitbangan dalam pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Pati dapat dilakukan melalui dukungan sumberdaya manusia, upaya-upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kelitbangan, evaluasi pra dan hasil kelitbangan, dukungan sarana dan prasarana kelitbangan serta pengembangan manajemen kelitbangan untuk mendukung implementasi pembangunan di Kabupaten Pati. Di lingkup Kabupaten Pati terdapat beberapa institusi/lembaga kelitbangan yang sebagian besar berupa perguruan tinggi keagamaan dan kesehatan.

Perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Pati berperan strategis terutama dalam mendukung pelaksanaan misi kedua pembangunan daerah 2017-2022 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan”. Masih ditemukannya kejadian kematian bayi, balita dan ibu serta terjadinya peningkatan angka kematian bayi dan balita (AKB dan AKABA) pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya di Kabupaten Pati. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih membutuhkan penanganan yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Pati. Oleh karena itu dukungan perguruan tinggi kesehatan khususnya dalam bentuk kerjasama kelitbangan sangat diperlukan. Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan perguruan tinggi keagamaan sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan misi pertama yaitu “meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal”. Keberadaan perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam mendukung inovasi Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi (*e-government*).

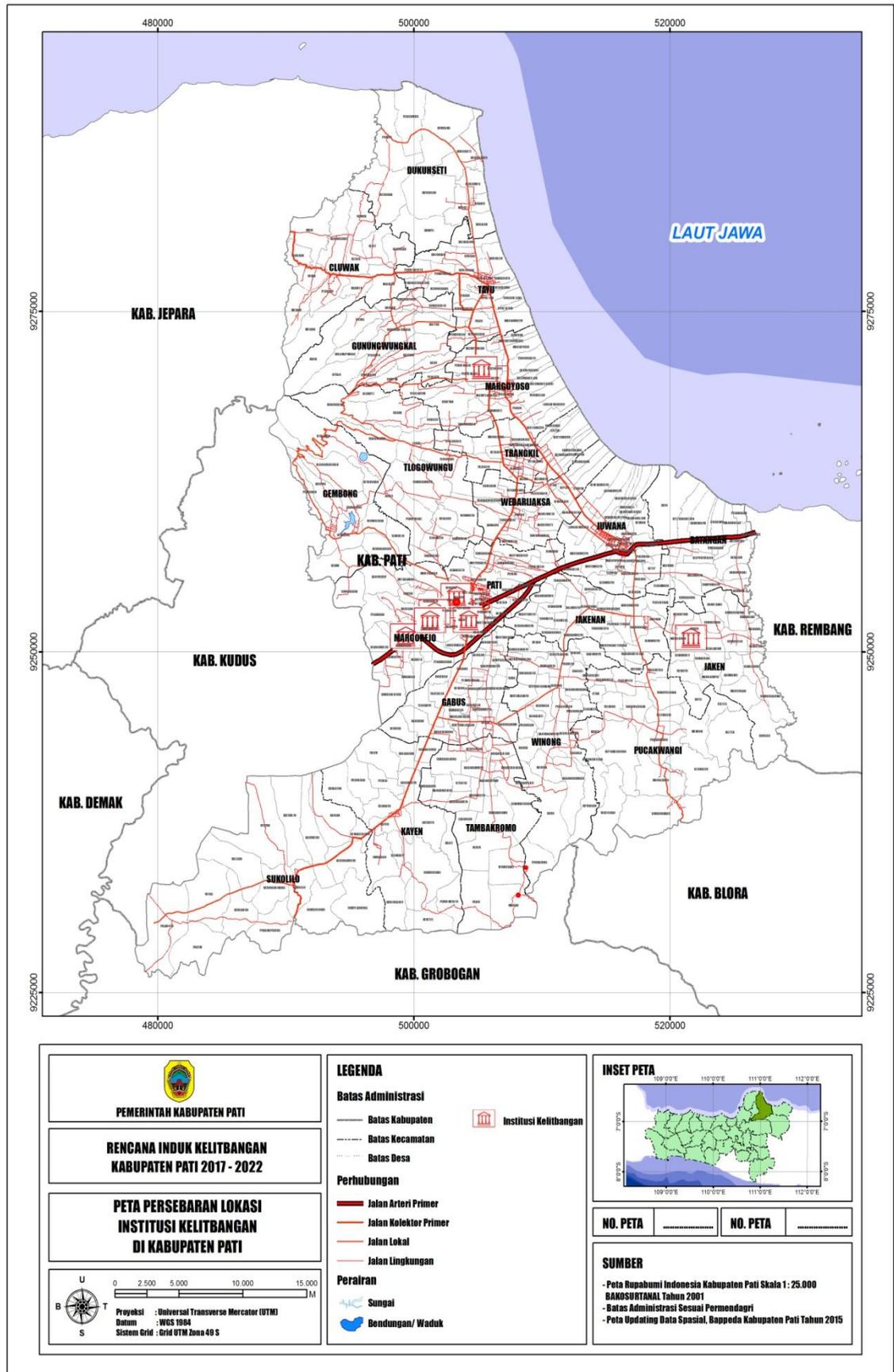
Institusi kelitbangan yang berlokasi di Kabupaten Pati disajikan pada Tabel 4.1. sedangkan persebaran lokasi institusi kelitbangan disajikan pada Gambar 4.1.

Tabel 4.1. Institusi kelitbangan di Kabupaten Pati

No	Nama	Alamat
1.	Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP)	Jl. Kampus Raya Nomor 5, Kecamatan Margorejo
2.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) AKI	Jl. Kamandowo Nomor 13, Kecamatan Pati
3.	Sekolah Tinggi Agama Kristen Wiyata Wacana (STAKWW)	Jl. P Diponegoro Nomor 33, Kecamatan Pati
4.	Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah (STAIMAFA)	Jl. Raya Pati-Tayu Km 20, Kecamatan Margoyoso
5.	Akademi Kebidanan (Akbid) Bakti Utama Pati	Jl. Ki Ageng Selo Nomor 15, Kecamatan Pati
6.	Akademi Kebidanan (Akbid) Duta Dharma Pati	Jl. Raya Pati-Kudus Km 6, Kecamatan Margorejo
7.	Akademi Perawat (Akper) Pragola	Jl. Banyu Urip Raya Nomor 26A, Kecamatan Margorejo
8.	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtang) Kementrian Pertanian	Jl. Raya Jakenan - Jaken, Km. 05, Kecamatan Jaken
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Pati	Jl. Raya Pati Kudus Km. 4, Kecamatan Margorejo

Keberadaan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtang) harus dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Balingtang merupakan institusi kelitbangan yang memiliki Pejabat Fungsional Peneliti terbesar di Kabupaten Pati yaitu berjumlah 27 orang dengan rincian 3 peneliti madya, 10 peneliti muda, 8 peneliti pertama dan 6 calon peneliti. Balingtang memiliki berbagai fasilitas khususnya laboratorium pengukur emisi gas rumah kaca untuk lahan sawah terbesar di dunia. Hasil-hasil kelitbangan dan inovasi di sektor pertanian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sebagian besar penduduk miskin tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian sebagai petani.

Keterlibatan Dewan Riset Daerah (DRD) harus terus diperkuat, salah satunya dalam bentuk pemilihan anggota DRD yang memiliki kualifikasi pendidikan mencukupi (S2 atau S3) serta memiliki keahlian yang mendukung dengan bidang-bidang prioritas kelitbangan.



Gambar 4.1. Persebaran Lokasi Institusi Kelitbangan di Kabupaten Pati

Keterlibatan institusi kelitbangan vertikal seperti BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri diperlukan agar arah kebijakan dan strategi kelitbangan antara pusat dan daerah dapat selaras. Kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku instansi pembinaan jabatan peneliti maupun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku instansi pembinaan jabatan perekayasa perlu terus dikuatkan terutama dalam upaya pengembangan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan serta pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk diterapkan di Kabupaten Pati.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Pati dalam menghasilkan hasil kelitbangan yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan program maupun sebagai evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah dapat ditunjang melalui integrasi seluruh komponen-komponen pelaksana kelitbangan di daerah, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, BAPPEDA sebagai perangkat litbang daerah perlu terus mendorong dan menciptakan atmosfer yang mendukung adanya keterlibatan institusi-institusi kelitbangan yang ada.

c) Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Kerjasama dan sinergitas pelaksanaan kelitbangan di BAPPEDA Kabupaten Pati ditetapkan berdasarkan prioritas kelitbangan dan instansi/institusi yang berkompeten memberikan kontribusi. Kompetensi sumberdaya manusia kelitbangan khususnya peneliti dan perekayasa merupakan bagian strategi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah. Selain itu pelaksanaan kelitbangan sangat tergantung anggaran yang proporsional dan kuantitasnya. Sumber-sumber pendanaan kelitbangan dapat berasal dari APBD, APBN, hibah-hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kerjasama kelitbangan berdasarkan prioritas kelitbangan yang terkait dengan isu-isu strategis dan prioritas kelitbangan Kabupaten Pati. Isu strategis dan prioritas kelitbangan dapat diajukan secara mandiri maupun usulan kegiatan dari perangkat daerah atau instansi-instansi terkait. Sinergitas pelaksanaannya ditentukan oleh skala kelitbangan (sederhana-kompleks) yang akan melibatkan dua atau lebih lembaga/instansi yang saling bekerjasama dalam kegiatan kelitbangan.

Keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan kelitbangan, mulai dari perencanaan sampai dengan aplikasinya diharapkan dapat memunculkan satu hasil kelitbangan yang dapat digunakan dalam menunjang program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kelitbangan yang dapat diterapkan dapat diproduksi melalui kerjasama yang apik antara lembaga/instansi. Penguatan kelitbangan tidak hanya dapat dilakukan melalui tema-tema yang sinkron dengan program-program pemerintah daerah, tetapi besaran anggaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan melalui kerjasama dengan instansi lain serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih terasa, menjadi hal yang sangat penting.

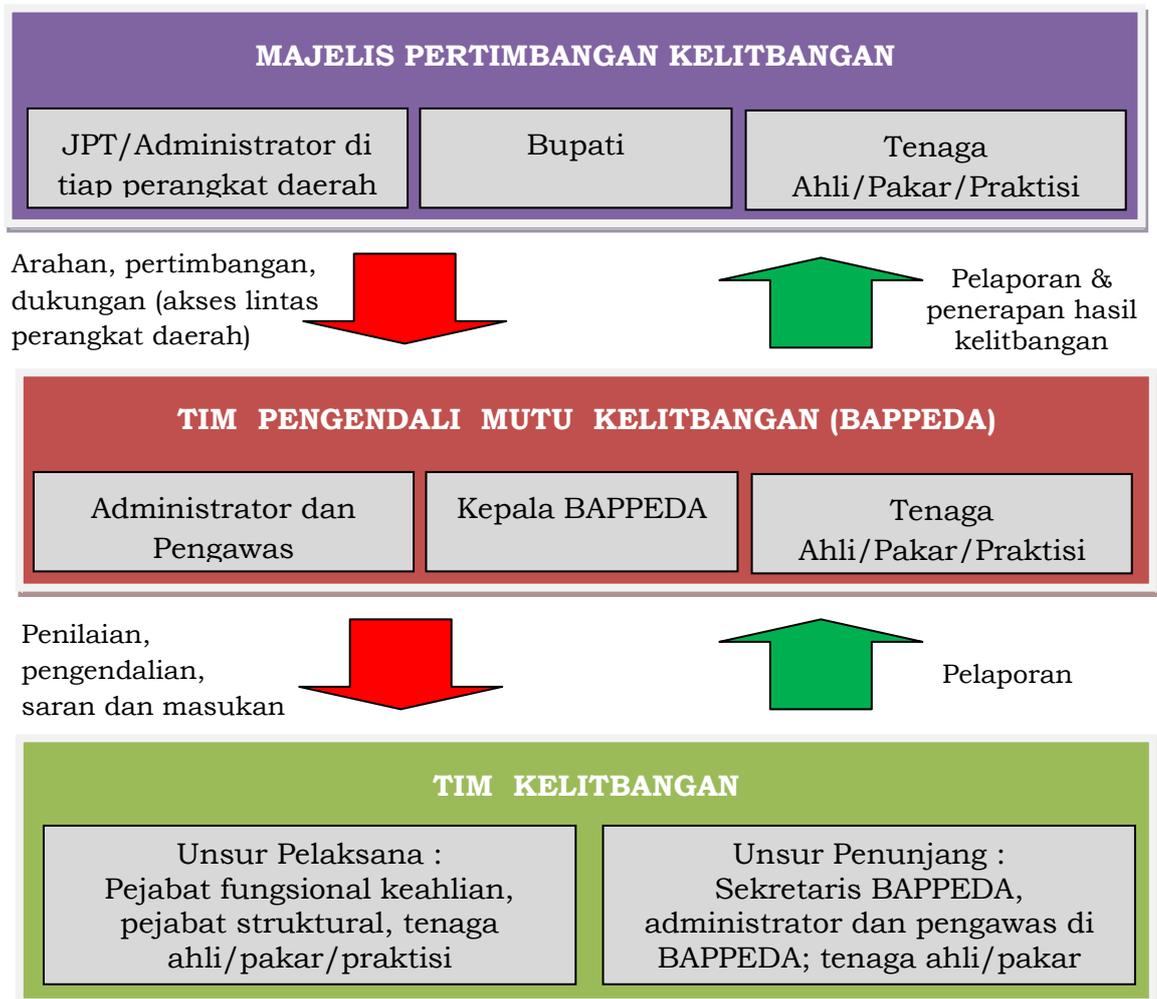
2. Evaluasi Pelaksanaan

Dalam upaya tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi di lingkup BAPPEDA Kabupaten Pati. Salah satu hal mendesak yang perlu segera direalisasikan adalah melengkapi keorganisasian kelitbangan di Kabupaten Pati. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan terbentuknya pengorganisasian kelitbangan di kabupaten/kota yang terdiri dari : i) Majelis Pertimbangan Kelitbangan; ii) Tim Pengendali Mutu Kelitbangan; dan iii) Tim Kelitbangan.

Salah satu sebab belum optimalnya penerapan hasil-hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah karena tidak terkaitnya proses pelaksanaan kelitbangan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kabupaten Pati. Hingga saat ini, baru terbentuk Tim Kelitbangan yang tugasnya lebih bersifat teknis yaitu melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, metodologi, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Perangkat Litbang Daerah (BAPPEDA). Terbentuknya Majelis Pertimbangan Kelitbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.

Majelis Pertimbangan Kelitbangan beranggotakan Bupati, pejabat tinggi pratama dan administrator di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati yang dibantu tenaga ahli/pakar/praktisi. Fungsi Majelis Pertimbangan Kelitbangan sangat strategis dalam menentukan efektifitas kelitbangan daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan *ex-ante* artinya dukungan sebelum kegiatan kelitbangan berlangsung berupa arahan agar topik-topik kelitbangan termasuk di dalamnya inovasi sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta kebutuhan perangkat daerah. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberi dukungan kelitbangan dalam bentuk akses pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan optimal. Majelis Pertimbangan juga memberi dukungan *ex-post* yang artinya dukungan setelah kegiatan kelitbangan berakhir berupa dukungan pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil kelitbangan sebagai basis setiap kebijakan daerah.

Tim Pengendali Mutu Kelitbangan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama (Kepala BAPPEDA), pejabat administrator dan pengawas di Perangkat Litbang Daerah (BAPPEDA) yang dibantu dengan tenaga ahli/pakar/praktisi. Tugas Tim Pengendali Mutu Kelitbangan berfokus pada upaya agar kegiatan kelitbangan dapat berjalan sesuai arahan Majelis Pertimbangan Kelitbangan serta efektif dalam alokasi penganggaran dan durasi waktu pelaksanaan. Tim Pengendali Mutu mengevaluasi dan menilai kegiatan kelitbangan sekaligus memberikan dukungan teknis antara lain anggaran, sarana dan prasarana sehingga kegiatan kelitbangan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil optimal. Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati diperlihatkan pada Gamabr 4.2.



Gambar 4.2. Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan Kabupaten

Alur koordinasi dan pengendalian kelitbangan dimulai dari pengusulan kegiatan kelitbangan dari masing-masing perangkat daerah ke perangkat litbang daerah (BAPPEDA). Tim kelitbangan melakukan tugas dan fungsinya dengan output tema dan usulan kegiatan kelitbangan yang disesuaikan dengan program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan yang terdapat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Keseluruhan usulan diajukan kepada Tim Pengendali Mutu untuk mendapatkan saran dan masukan serta penilaian kelayakan kegiatan kelitbangan yang diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, usulan yang telah mendapatkan penilaian dari Tim Pengendali Mutu diajukan dalam Sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan yang wajib dilaksanakan satu tahun sekali. Majelis Pertimbangan Kelitbangan memberikan arahan agar seluruh usulan kelitbangan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan mendukung visi dan misi Kepala daerah.